

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Nomor SOP	Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	17 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, <i>nk</i>  <u>Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si</u> Rembina Tk. / IV/b) NIP. 196803241989031006
Judul SOP	Pengujian tentang Konsekuensi
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Pendidikan minimal SLTA. 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 4. Memahami Pengelolaan Informasi Publik 5. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi; 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 3. SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi yang Dikecualikan; 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi; 6. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi ; dan 7. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.	1. Alat Tulis Kantor. 2. Lemari Rak Dokumen/Buku dan Organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. Daftar Informasi Publik
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penetapan dan pemutakhiran informasi yang dikecualikan	1. Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Arsip (Hardcopy dan Softcopy)

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	Unit yang menguasai dan mengelola Informasi	PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Atasan PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4		5	6	7	8
1	Mengumpulkan data usulan daftar informasi yang dikecualikan dari unit kerja yang menguasai	Mulai				Nota Dinas	1 hari kerja	Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen usulan daftar informasi yang dikecualikan					Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan, Perundang-undangan yang dibutuhkan	1 hari kerja	Daftar Nama Informasi dan alasan pengecualian	
3.	Melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan					Daftar Nama Informasi dan alasan pengecualian	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi	Melibatkan pejabat unit pengelola informasi terkait
4.	Memutuskan dan mengesahkan Hasil Pengujian Konsekuensi			Tidak		Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi	
5.	Dokumen disimpan sebagai arsip	Selesai			Ya	Lembar Pengujian Konsekuensi	10 menit	Arsip	Softcopy dan hardcopy